

## **BAB III**

# **PENOLAKAN SINGAPURA TERHADAP KEINGINAN TIMOR LESTE BERGABUNG ASEAN**

### **3.1. KONDISI POLITIK DOMESTIK INDONESIA**

Dalam penjelasan sebelumnya, diketahui bahwa terdapat tiga faktor determinan dalam mempengaruhi suatu negara dalam mengambil kebijakan. Pada bab ini tiga faktor tersebut akan penulis elaborasikan dengan sub-sub yang penulis sajikan. Karena Ketiga pertimbangan di atas memiliki peran yang saling berkesinambungan dalam mempengaruhi pertimbangan pembuat kebijakan untuk mengambil keputusan. Konteks dalam negeri yang terdiri atas politik dalam negeri, kekuatan ekonomi dan militer berperan bersama dengan konteks internasional dalam membentuk arah politik luar negeri. Ketiga pertimbangan tidak berdiri secara terpisah, melainkan saling memberikan pengaruh dalam proses pembuatan kebijakan.

Apalagi kedekatan geografis berhubungan dengan perdagangan antar negara, serta keanggotaan bersama dalam organisasi-organisasi antar-pemerintah. Demikian halnya dengan aspek ekonomi yang merupakan bagian penting dalam konteks internasional. Arus barang dan jasa maupun arus modal menciptakan pola ketergantungan suatu negara terhadap Negara lain. Selain itu, aspek politis yang digambarkan dengan hubungan politis antarnegara juga berperan besar dalam politik luar negeri suatu negara. Menurut Coplin aliansi keamanan dapat berdampak besar terhadap anggota maupun non-anggota aliansi dalam perumusan politik luar negeri

#### **3.1.1 BIROKRASI**

Dalam hal ini terdapat pihak “*bureaucratic influencer*” yang mempengaruhi terciptanya sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. William D. Coplin menjelaskan bahwa pihak-pihak tersebut adalah mereka yang masuk kedalam lembaga eksekutif dalam sebuah pemerintahan (Coplin, Pengantar Politik Internasional, 1992, pp. 81-2). Dengan demikian maka dalam penerimaan bergabungnya Timor Lest ke ASEAN juga dipengaruhi oleh birokrat dalam hal ini kementrian.

### **Kementrian Luar Negeri Singapura (*Ministry of Foreign Affairs Singapore*)**

penolakan pemerintah Singapura terhadap bergabungnya Timor Leste menjadi anggota ASEAN juga berasal dari Kementerian Luar Negeri Singapura. Dalam hal ini menjalankan fungsinya sebagai pihak yang mendapatkan mandat undang-undang untuk mengatur hubungan luar negeri. Hal ini tertera di dalam website resmi kemntrian Singapura. Menurut situs resmi tersebut tersebut kementrian ini memiliki delapan fungsi (Ministry of Foreign Affairs, 2019) yaitu:

- Menjunjung tinggi kedaulatan Singapura
- Mempromosikan lingkungan regional yang damai
- Mempertahankan relevansi Singapura secara internasional
- Perluas ruang politik dan ekonomi Singapura
- membagikan pengalaman perkembangan Singapura ke dunia
- Terhubung dengan orang Singapura yang bepergian dan tinggal di luar negeri, bantu mereka pada saat dibutuhkan

Dengan melihat mengenai fungsi dari Kementerian Luar Negeri maka diketahui bahwa urusan luar negeri, kemudian urusan diplomasi, negosiasi dan hal-hal yang berkaitan dengan luar negeri. Dalam konteks penolakan Timor Leste bergabung ASEAN, Dari data yang didapat dari Singapura Hanya Singapura dan Laos yang berulang kali memblokir tawaran negara itu dengan alasan bahwa itu Timor Leste belum cukup berkembang untuk bergabung dengan organisasi regional. Mereka berpikir bahwa Timor-Leste perlu mengatasi sejumlah rintangan sebelum menerima keanggotaan (Kapur, 2016).

### **3.1.2 Partai Politik**

Pada komponen kedua adalah partai politik, dimana menurut William D. Coplin, partai politik merupakan *partisan influencer*. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kelompok kedua ini melakukan keberpihakan terhadap aktor politik yang ada dalam hal ini eksekutif. Selain itu partai politik berfungsi dalam menyalurkan tuntutan-tuntunan masyarakat kepada pengambil kebijakan, dengan demikian pengambil kebijakan dapat ditekan oleh kelompok ini (Coplin, Pengantar Politik Internasional, 1992, pp. 84-5).

Di dalam konteks ini perjabat pemerintahan khususnya di ranah eksekutif berasal dari kader partai, apalagi perdana menteri posisi politis yang secara demokrasi mesti berasal dari partai politik. Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong merupakan salah satu senior dari partai People's Action Party, singkatan: PAP, adalah sebuah partai politik di Singapura. Partai ini berkuasa sejak tahun 1954 dan menguasai formasi pemerintahan Singapura. Pada pemilu parlemen 1963, PAP sangat dominan melalui sistem demokrasi parlementer dan tampil sebagai partai otoriter yang hampir tidak bisa dilawan oleh pihak oposisi. Bidang politik, sosial, dan pembangunan ekonomi sebagai prioritas pembangunan bangsa. Para pengkritik dari kalangan oposisi tak mampu berbuat banyak karena PAP sangat mendominasi parlemen. Kebijakan-

kebijakannya jarang ditentang rakyat. Bahkan, hampir tak pernah terdengar adanya upaya demonstrasi. Hal ini turut membantu PAP meningkatkan ekonomi dan menyebabkan pertumbuhan negara yang pesat (Bellows, 2009).

Alih-alih memberikan kabar baik terkait dukungan Singapura agar Timor Leste bergabung ASEAN namun justru malah mengajak Timor Leste untuk memperkuat kerja sama dan mengikuti *Singapore Cooperation Programme*, hal ini bisa dilihat ketika Perdana Menteri Lee Hsien Loong mengirim surat ucapan selamat atas terpilihnya Mari Alkatiri sebagai Perdana Menteri pada tahun 2017. Berikut adalah bunyi suratnya yang dikutip *straitstimes.com* "*Timor-Leste has made great strides since its independence in 2002, including through your personal contributions during your first term as Prime Minister, and later as President of the Authority of the Oe-Cusse Special Administrative Region, As small states, we share many common concerns and interests and have worked well together bilaterally and at multilateral fora, I look forward to working with you to further strengthen our bilateral ties*". (Nn, Singapore PM Lee Hsien Loong congratulates new Timor Leste counterpart Mari Alkatiri, 2017).

### **3.1.3 Kelompok Yang Berkepentingan**

Variabel ketiga ini adalah "*interest influencers*" yaitu terdiri dari beberapa orang yang bergabung dalam sebuah kelompok dengan memiliki tujuan dan kepentingan bersama (Coplin, Pengantar Politik Internasional, 1992, p. 87). Dalam hal ini kelompok menikmati kondisi Timor Leste belum bergabung ASEAN adalah seorang-pengusaha dari Singapur bernama Zuo Haibin.

#### **Zou Haibin dan Vico Construction**

Timor Leste telah bekerjasama dengan investor swasta untuk mengembangkan pembangunan properti 14 lantai hingga 16 lantai, yang terdiri dari apartemen mewah, unit ritel

dan properti kantor, di Timor-Leste. Proyek ini akan menelan biaya sekitar US \$ 22,8 juta, termasuk biaya konstruksi, tanah, penjualan dan administrasi; mitra JV akan memberikan kontribusi hingga US \$ 20 juta sebagai pinjaman pemegang saham kepada perusahaan JV. Setiap pinjaman pemegang saham bebas bunga. Setiap persyaratan modal yang melebihi sumber daya JV sendiri akan didanai oleh pinjaman bank, katanya. A-Smart akan mengambil 60 persen saham mayoritas di JV dan karenanya, komitmen modalnya di JV akan mencapai US \$ 12 juta, yang sebagian besar akan didanai dari sumber kas internal. JV adalah aliansi strategis antara kelompok dan Liao Sheng Tung dan Ng Choon Meng, yang merupakan mitra bisnisnya di Timor-Leste, serta Vico Construction dan Daniel Vincent Iong Remedious, yang merupakan calon pemilik tanah. Vico Construction adalah JV antara Zuo Haibin dan pengembang Cina Nanshan Group (Meixiani, 2019).

Situs proyek, yang terdiri dari area seluas 3.135 meter persegi tanah hak milik, terletak di sepanjang garis pantai Lecidere di Dili. Langsung menghadap Pelabuhan Dili, situs tersebut terletak dekat dengan kantor pusat Bank Dunia, kedutaan asing dan kantor pemerintah Timor. Ma Wei Dong, ketua A-Smart Holdings, mengatakan masuknya perusahaan ke pasar negara berkembang, yang kaya akan minyak dan gas, "tepat waktu" karena ada kekurangan properti perumahan dan komersial yang berkualitas di sana. *"Memanfaatkan keuntungan penggerak pertama, tepat waktu kami akan memungkinkan kami untuk memperluas basis pendapatan kami dan menghasilkan jalan baru pendapatan yang diperlukan bagi kami untuk tumbuh secara berkelanjutan."* Kelompok itu mengatakan yakin bahwa rencana pemerintah untuk mengubah Pelabuhan Dili menjadi pusat pelayaran akan memungkinkan pembeli rumah dan investor menikmati pertumbuhan dalam penilaian pembangunan (Meixiani, 2019).

### 3.1.4 Media Massa

Variabel keempat adalah Media Massa atau “*mass influencers*”, dalam hal ini adalah media massa yang dapat melakukan pembuatan opini dalam masyarakat (Coplin, Pengantar Politik Internasional, 1992, pp. 88-9). Secara garis besar terdapat tiga jenis “*framing*” yang dilakukan oleh media mengenai sebuah isu. Dengan demikian keluaran dari sebuah opini terbentuk oleh adanya pemberitaan media masa. Adapun tiga jenis tersebut adalah; *Pertama*, positif, dalam hal ini media massa sebagai mass influencer memberikan opini dan pemberitaan yang positif mengenai sebuah isu. *Kedua*, negatif, pada konteks ini media massa memberikan opini atau pemberitaan yang lebih menyudutkan suatu isu. *Ketiga*, netral, dalam hal ini media massa tidak melakukan framing dan atau pemberitaan yang positif maupun negatif. Melainkan secara objektif melaporkan perkembangan terakhir.

Dalam konteks ini peran media dalam melakukan framing terkait penolakan Singapura terhadap keanggotaan Timor Leste di ASEAN merupakan hal yang penting namun yang penulis dapatkan berita tentang penolakan Singapura jarang ditemukan, berkebalikan dari itu berita tentang bantuan Singapura yang diberikan ke Timor Leste mudah diakses penulis, berikut adalah headline berita yang penulis dapatkan;

No.	Nama Media	Isi	Situs
1	The Straitstimes	Singapore, Timor-Leste reaffirm bilateral ties	<a href="https://www.straitstimes.com/singapore/timor-leste-reaffirm-bilateral-ties">https://www.straitstimes.com/singapore/timor-leste-reaffirm-bilateral-ties</a>
2	Businesstimes	A-Smart in JV to build mixed development in Timor-Leste	<a href="https://www.businesstimes.com.sg/companies-markets/a-smart-in-jv-to-build-mixed-development-in-timor-leste">https://www.businesstimes.com.sg/companies-markets/a-smart-in-jv-to-build-mixed-development-in-timor-leste</a>
3	Todayonline	East Timor stake buy brings	<a href="https://www.todayonline.com/world/east-timor-stake-buy-brings-sunrise-gas-field">https://www.todayonline.com/world/east-timor-stake-buy-brings-sunrise-gas-field</a>

		Sunrise gas field a step closer	<a href="#">step-closer</a>
--	--	---------------------------------	-----------------------------

(Tabel 1.5)

Dalam tabel tersebut dapat dilihat bahwa media menetapkan framing positif framing positif dengan menulis tentang bantuan bantuan Singapura ke Timor Leste tanpa banyak memberitakan mengenai penolakan Singapura terhadap keanggotaan Timor Leste di ASEAN. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa media massa memberitakan secara cerdas. Selain itu isu ini tidak menjadi pokok bahasan oleh media.;

### **3.2 KONDISI EKONOMI DAN KEAMANAN**

Dalam konteks ini penulis melihat realita perekonomian Timor Leste, penting untuk dilihat karena perekonomian Timor Leste merupakan cerminan bagaimana kelangsungan hidup Timor Leste kedepan. Mengingat di era keterbukaan ini daya saing yang menentukan keselamatan sebuah negara. Maka dari itu Timor Leste harus bisa bersaing,

#### **3.2.1 Kondisi Ekonomi**

Aspek kemampuan ekonomi merupakan salah satu hal yang penting dalam penentuan kebijakan luar negeri suatu negara. dimana kemampuan ekonomi juga dijadikan sebagai alat politik luar negeri suatu negara. Willian D. Coplin menyebut bahwa Kemampuan ekonomi suatu Negara memainkan peran penting dalam politik luar negeri Negara itu. Coplin juga menerangkan bahwa terdapat dua kriteria untuk menaksir kemampuan ekonomi suatu negara. *Pertama*, kapasitas produksi barang dan jasa; *Kedua*, Ketergantungan pada Perdagangan dan Finansial Internasional (Coplin, 2003, pp. 115-20).

Negara muda Timor-Leste di Asia Tenggara itu berharap bahwa Singapura akan memainkan peran yang lebih besar dalam kisah pembangunannya karena Timor Leste berusaha untuk menjadi negara berpenghasilan menengah ke atas pada tahun 2030.

Menteri Luar Negeri dan Kerjasamanya Dionisio da Costa Babo Soares mengatakan dalam kunjungan resminya yang pertama ke Republik bahwa Timor Leste perlu menarik lebih banyak investasi dalam industri potensial utama seperti pariwisata, energi dan pertanian. Dia mengatakan negara Singapura telah meletakkan dasar untuk memungkinkan investasi mengalir ke Timor Leste, yang memperoleh kemerdekaan pada tahun 2002 dan memiliki populasi muda 1,3 juta (Wei, 2019).

Menurut Bank Dunia, Negara-Negara Penghasilan Menengah memiliki pendapatan nasional bruto per kapita (GNI) dari US \$ 1.006 menjadi \$ 12.235 (S \$ 1.369 hingga S \$ 16.655). Timor Leste terdaftar sebagai negara berpendapatan menengah ke bawah, dengan GNI antara \$ 1.006 dan \$ 3.995. Dalam pidatonya di Forum Bisnis Timor-Leste-Singapura yang diadakan di Shangri La Hotel, Dr Soares mengatakan negaranya telah mengajukan permohonan untuk menjadi anggota Asean. "Kami adalah negara yang termasuk (geografis) di wilayah ini," tambahnya. Mantan presiden negara itu Jose Ramos-Horta juga menghadiri forum itu. Dr Ramos-Horta adalah penerima bersama Hadiah Nobel Perdamaian 1996 atas pekerjaannya dalam membantu menyelesaikan konflik di Timor Leste, yang dianeksasi oleh Indonesia pada tahun 1975 (Wei, 2019).

Negara ini saat ini bergantung pada pengeluaran pemerintah dalam jangka pendek dan pendapatan dari sumber daya alam, Bank Dunia menyatakan di situs webnya. Tetapi ketidakpastian politik dan ekonomi telah mendorong produk domestik bruto (PDB) Timor Leste turun untuk tahun kedua berturut-turut, laporan ekonomi negara itu pada bulan Mei



menunjukkan. Namun, Bank Dunia mencatat bahwa PDB diperkirakan akan tumbuh 3,9 persen tahun ini, dengan Anggaran negara disetujui pada bulan Februari. Ini akan membuat negara meningkatkan pengeluaran publik, yang mencakup US \$ 366,4 juta untuk infrastruktur (Wei, 2019).

Duta Besar non-residen Singapura untuk Timor Leste Roland Ng mengatakan bahwa kedua negara memiliki kesamaan. "Kami berdua negara pulau kecil yang mengakui pentingnya membuka dan terhubung ke jaringan global," kemudian menambahkan bahwa Singapura siap membantu Timor Leste membangun layanan sipil dan ekonominya. Mr Ng menambahkan bahwa kunjungan dua hari Dr Soares ke Singapura, sebagai bagian dari kunjungan pengantar ke wilayah tersebut, menggarisbawahi hubungan erat antara kedua negara. Sekitar 700 pejabat Timor-Leste telah berpartisipasi dalam kursus di sini seperti dalam pengembangan ekonomi, administrasi publik dan penerbangan sipil sebagai bagian dari program pemerintah Singapura, katanya. Mr Ng mendesak Timor Leste untuk menggunakan status Singapura sebagai pusat regional untuk lebih mengembangkan ekonominya (Wei, 2019).

### **3.3 KEMAMPUAN MILITER SINGAPURA**

Pada konteks ini William D. Coplin menerangkan bahwa kemampuan suatu negara atau kapasitas penggunaan kekuatan militer juga mempengaruhi pengambilan kebijakan suatu negara (Coplin, Pengantar Politik Internasional, 1992, p. 124). Lebih lanjut William D. Coplin menjelaskan terdapat tiga aspek yang perlu diukur untuk melihat pengaruh determinan faktor militer. *Pertama*, kapasitas penggunaan kekuatan militer; *Kedua* tingkat ketergantungan senjata dan pendanaan dari sumber-sumber luar negeri; *Ketiga*, Kestabilan internal dan kemampuan militer (Coplin, 2003, pp. 124-30).

Pada hal ini William D. Coplin menerangkan bahwa Pada hal ini kemampuan suatu negara atau kapasitas penggunaan kekuatan militer juga mempengaruhi pengambilan kebijakan suatu negara (Coplin, Pengantar Politik Internasional, 1992, p. 124)..

William D. Coplin menjelaskan terdapat tiga aspek yang perlu diukur untuk melihat pengaruh determinan faktor militer. *Pertama*, kapasitas penggunaan kekuatan militer; *Kedua*, tingkat ketergantungan senjata dan pendanaan dari sumber-sumber luar negeri; *Ketiga*, Kestabilan internal dan kemampuan militer (Coplin, 2003, pp. 124-30).

### **3.3.1 Kapasitas Penggunaan Kekuatan Militer**

William D. Coplin menerangkan dalam komponen ini dimana dapat dihitung dari jumlah pasukan, tingkat pelatihan dan sifat perlengkapan militernya, (Coplin, Pengantar Politik Internasional, 1992, p. 124). Militer Singapura memiliki 3 sektor, yaitu Angkatan Darat (AD), angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU). Jumlah personel militer Singapura mencapai 385 ribu orang, dengan 72,5 ribu diantaranya personel aktif dan 312,5 ribu personel cadangan.

Angkatan udara Singapura memiliki 100 penyerang dengan 100 serangan. Selain itu, Singapura memiliki 36 personel dalam pelatihan dan 9 transportasi militer AU. AU Singapura memiliki 78 helikopter dan 17 diantaranya adalah helikopter serang. AD Singapura memiliki 190 tank perang, dan kendaraan perang lainnya mencapai 3,5 ribu. Selain itu, ada 48 artileri otomatis dan 138 artileri manual, dan 18 proyektor roket (Gao, 2018).

Singapura rata-rata membuat sendiri artileri manual seri Howitzer (beberapa buatan Israel) mereka, sedangkan kendaraan seperti tank, kendaraan militer, dan peluncur misil dan roket buatan Inggris, Amerika Serikat, Israel, dan Kanada. AL Singapura memiliki total aset 40, dengan 6 frigate, 6 corvet, 11 kapal patroli, dan 4 pangkalan perang. Kemiliteran Singapura

didukung oleh berbagai sumber daya lainnya, yaitu 3,6 juta pekerja di bidang kemiliteran, dengan perdagangan yang berkaitan dengan kelautan mencapai 3,5 ribu (Loh, 2019).

Anggaran yang digelontorkan pemerintah Singapura biasanya 3-4 persen dari PDB, The Diplomat melansir. Pertahanan menempati pengeluaran tertinggi anggaran pemerintah Singapura, mencapai 18 persen, diikuti oleh transportasi yaitu 17 persen. Dengan sumber daya terbatas, Singapura memastikan bahwa setiap sistem bersinergi dengan baik. Antara teknologi, pelayanan, dan pelatihan sumber daya dikerjakan se-efektif mungkin untuk membangun militer profesional (Parameswaran, 2018).

### **3.3.2 Tingkat Ketergantungan pada Sumber-sumber Luar Negeri**

Indikator kedua adalah tingkat ketergantungan pada sumber-sumber luar negeri. Dalam hal ini diterangkan oleh William D. Coplin bahwa kekuatan militer suatu negara tidak menjadi satu tolak ukur, melainkan juga sejauhmana negara tersebut mengalami ketergantungan alutista dengan negara lain. Sehingga hal tersebut mempengaruhi kemampuan negara tersebut (Coplin, 2003, p. 126]).

Kebijakan luar negeri Singapura telah lama didasarkan pada kemitraan ekonomi, namun tidak menggunakan aliansi militer sebagai stimulus kepentingan ekonomi ini. Sebagai gantinya, Singapura mengalokasikan sebagian besar anggarannya untuk pengeluaran pertahanan, dengan kata lain ini menjadikan Singapura sebagai negara yang secara militer patut disegani dan diperhitungkan. Antara 2008 dan 2012, Singapura menyumbang empat persen dari semua impor senjata global, menjadikannya importir perangkat keras militer terbesar kelima. Negara ini sekarang menghabiskan 25 persen dari anggaran tahunannya untuk pertahanan. Pengeluaran militernya telah meningkat dari \$ 600 juta setiap tahun pada awal 1980-an menjadi \$ 12 miliar pada 2013 (Mustafa, 2014).

### 3.3.3 Kestabilan Internal dan Kemampuan Militer

Indikator ketiga menurut William D. Coplin merupakan peran militer juga dipengaruhi oleh adanya keamanan kestabilan internal dan sejauh mana kemampuan dan strategi militer tersebut berfungsi (Coplin, 2003, p. 128). *"In a world where the big fish eat small fish and the small fish eat shrimps, Singapore must become a poisonous shrimp,"* kata Lee Kuan Yew, bapak bangsa Singapura.

Lee menggambarkan kekhawatiran bahwa jika terjadi konflik, Singapura akan dikuasai dan dengan demikian Singapura harus mengambil sikap defensif. *"Singapore has no territory to fall back on and to regroup its military in,"* kata Wendell Minnick, editor Berita Pertahanan yang bermarkas di Taiwan. *"Over time Singapore has realised that the defence of its territory needs to be a 'pre-emptive equation' rather than a defensive one, much like Israel."* Kesadaran ini telah mengubah kebijakan pertahanan Singapura dari filosofi "udang beracun" tentang pertahanan diri menjadi sesuatu yang lebih agresif kata Brigadir Jenderal (dan sekarang Perdana Menteri) Lee Hsien Loong pada tahun 1984. Pada 1980-an Singapura berubah. dari "udang beracun" ke strategi "landak", yang bertujuan untuk menimbulkan biaya yang tidak dapat ditoleransi pada musuh potensial dan bertahan lebih lama dari penyerang jika terjadi konflik (Mustafa, 2014).

Ancaman teroris utama ke Singapura adalah dari Jemaah Islamiyah (JI), yang memiliki hubungan dengan al-Qaeda dan Abu Sayyaf. Jemaah Islamiyah diketahui telah melakukan pemboman Bali pada tahun 2002, seorang informan mengungkapkan informasi kepada Departemen Keamanan Internal Singapura mengenai Muhammad Aslam Yar Ali Khan, seorang warga Singapura keturunan Pakistan, yang merupakan anggota kelompok yang bermitra dengan Al-Qaeda (Nn, Islamic militant detained in Singapore under Internal Security Act, 2005).

Muhammad Aslam Yar Ali Khan ditempatkan di bawah pengawasan Departemen Keamanan Internal Singapura, setelah itu ia pergi ke Pakistan pada 4 Oktober. Pria ini ditangkap oleh pasukan Aliansi Utara Afghanistan di Afghanistan. Pada 9 Desember 2001, 13 tersangka ditangkap. Segera setelah itu, sebuah video ditemukan di sebuah rumah yang ditinggalkan di Kabul Afghanistan menunjukkan seorang narator di Singapura yang menggambarkan bagaimana menyerang orang Amerika menggunakan bahan peledak. Penyelidik menemukan kaset serupa di kediaman para pria yang ditangkap. Secara keseluruhan, 33 orang ditangkap sehubungan dengan rencana ini. Pada Agustus 2002, 21 anggota Jemaah Islamiyah lainnya ditangkap oleh otoritas Singapura (Nirmala, 2013).

Otoritas Singapura percaya bahwa Jemaah Islamiyah tetap aktif di Asia Tenggara dan merekrut anggota baru. Pada tanggal 25 Agustus 2005, hakim investigasi Prancis Jean-Louis Bruguière memilih Singapura bersama dengan Tokyo dan Sydney sebagai sasaran potensial terorisme Al-Qaeda (Nirmala, 2013).

### **3.4 KONTEKS INTERNASIONAL**

Sub bab ini membahas mengenai faktor determinan ketiga yaitu konteks internasional. Dalam penjelasannya, William D. Coplin menjelaskan bahwa sifat sistem internasional dan hubungan antara negara dengan kondisi-kondisi dalam sistem, menentukan bagaimana negara itu akan berperilaku (Coplin, Pengantar Politik Internasional, 1992, pp. 164-62). Dengan demikian maka bab ini menjelaskan kondisi internasional yang terjadi sehingga mendorong Singapura untuk penolakan terhadap keinginan Timor Leste bergabung ASEAN. Dengan demikian maka terdapat tiga (4) sub-bab yang akan dibahas dalam bab ini. *Pertama*, hubungan erat Indonesia dan Timor Leste; *Kedua*, Timor Leste dan Amerika *Ketiga*, Timor Leste dan Australia dan *Keempat*, Timor Leste dan China

Dalam konteks ini proses pembangunan negara Timor Leste ada beberapa negara yang kemudian menjadi partner dekat Timor Leste dalam untuk membantu negara itu berdiri. Menurut (Ben Dolven, Timor-Leste: Political Dynamics, Development, and International Involvement, 2012) Negara-negara tersebut akan dijelaskan dibawah ini merupakan negara yang secara geopolitik merupakan negara rival Singapura dalam kontestasi global, sebut saja Indonesia, Amerika, Australian dan China. Berikut adalah penjelasannya;

### **3.4.1 Indonesia**

Timor-Leste telah mengambil pendekatan praktis untuk menjalin hubungan dengan tetangga mereka yang relatif lebih dari 240 juta.. Sebuah laporan akhir yang dikeluarkan oleh Indonesian-Timor-Leste Truth Commission bersama pada Mei 2008 menyalahkan Indonesia atas kekejaman pada tahun 1999. Walaupun laporan tersebut berhenti untuk merekomendasikan amnesti bagi para pemimpin militer dan milisi Indonesia, itu dipandang sebagai perjanjian diam-diam untuk bergerak melewati sejarah traumatis. Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan "penyesalan mendalam" atas pelanggaran HAM. Presiden Ramos-Horta mendesak Timor-Leste untuk melanjutkan dan mengesampingkan masa lalu setelah laporan itu dirilis. Indonesia dipandang sebagai pengusul yang paling antusias untuk mengizinkan keanggotaan Timor-Leste di ASEAN. Kedua belah pihak telah mengeksplorasi kerja sama energi dan hubungan ekonomi lainnya. Program-program lain bergerak lebih lambat, termasuk lebih banyak koordinasi dalam manajemen perbatasan, dan kemungkinan perjalanan bebas visa antara Timor-Leste dan provinsi tetangga Indonesia di Timor Barat.

### **3.4.2 Amerika Serikat**

Program bantuan AS di Timor-Leste telah berupaya membangun ekonomi pasar bebas yang mandiri, seperti mengembangkan layanan publik dasar seperti layanan kesehatan, dan mendukung tata pemerintahan yang baik melalui sistem politik demokrasi yang baru muncul dan prakarsa demokrasi pasca konflik. Total bantuan luar negeri A.S. ke Timor-Leste tahun 2012 diperkirakan \$ 14,5 juta. Total permintaan untuk Timor-Leste pada tahun 2013 sama dengan \$ 12,8 juta. Pada Mei 2010, Millennium Challenge Corporation menyetujui program ambang batas tiga tahun senilai \$ 10 juta dengan Timor-Leste. Bantuan A.S. telah membantu pembangunan ekonomi dan politik Timor-Leste dengan mendukung media independen, organisasi masyarakat sipil, dan partai politik serta memperkuat proses pemilihan, membangun lembaga peradilan, dan memperkuat kapasitas pemerintah di berbagai bidang termasuk pengelolaan sumber daya fiskal. Pada Juli 2011, Departemen Luar Negeri US dan Kementerian Luar Negeri Cina mengumumkan program bersama untuk mempromosikan ketahanan pangan di Timor-Leste.

### **3.4.3 Australia dan Selandia Baru**

Dukungan politik Australia untuk tujuan orang Timor telah memainkan peran penting dalam pembentukan negara merdeka Timor-Leste. Banyak orang Australia memiliki rasa hutang kepada orang Timor untuk bantuan yang mereka berikan kepada pasukan Australia melawan Jepang di sana selama Perang Dunia II. Australia dan Selandia Baru telah membantu memberikan stabilitas dan membantu menjaga situasi hukum dan ketertiban di Timor-Leste selama periode ketidakstabilan sejak 1999. Ketika situasi keamanan membaik, Australia dan Selandia Baru telah mengurangi kehadiran militer mereka di negara itu.

Terlepas dari keterlibatan ini, hubungan antara Australia dan Timor-Leste tegang oleh ketidaksepakatan mengenai sumber daya energi Laut Timor. Perdana Menteri Minster Gusmao meminta Australia untuk lebih jujur dalam perundingannya atas sumber daya hidrokarbon bawah

laut. Diperkirakan oleh satu sumber bahwa Australia dan Timor-Leste akan berbagi pendapatan sebanyak \$ 30 miliar dari ladang Greater Sunrise. Timor-Leste dilaporkan memperoleh dua kapal patroli Korea selain dua kapal patroli Tiongkok yang baru-baru ini diperolehnya. Ini dipandang sebagai upaya untuk menegaskan kembali kemerdekaan Timor-Leste dan menjauhkan diri dari Australia yang sebelumnya menawarkan untuk melakukan patroli laut untuk Timor-Leste. Timor-Leste memiliki kekayaan besar di bawah dasar laut di ladang minyak dan gas yang dikenal sebagai Greater Sunrise antara itu dan Australia.

Di bawah perjanjian sebelumnya, keputusan tentang bagaimana mengeksploitasi sumber daya energi Laut Timor harus dibuat secara komersial. Timor-Leste telah berharap bahwa perusahaan-perusahaan swasta akan memutuskan untuk membangun saluran pipa ke Timor-Leste, daripada ke Darwin, Australia. Keputusan semacam itu akan memungkinkan Timor-Leste untuk mengembangkan fasilitas pemrosesan di Timor-Leste. Kedalaman dasar laut dan kenaikan curam di sisi Timor-Leste dari Laut Timor telah bekerja melawan kasus Timor-Leste. Laporan media Australia mengatakan bahwa perusahaan swasta telah memutuskan untuk membangun anjungan apung di Laut Timor alih-alih pipa ke Darwin atau Dili. Woodside Corporation telah menyatakan bahwa mereka percaya anjungan lepas pantai akan bernilai masing-masing \$ 13 miliar untuk Australia dan Timor-Leste.

#### **3.4.4 China**

Tiongkok memberikan bantuan dengan pembangunan gedung-gedung pemerintah dan baru-baru ini menjual kapal-kapal patroli ke Timor-Leste yang seharusnya membantu Timor-Leste melindungi sumber daya kelautannya. Timor-Leste menerima pengiriman dua kapal patroli angkatan laut Kelas Shanghai pada Juni 2010. Timor-Leste kehilangan sekitar \$ 40 juta setahun untuk penangkapan ikan ilegal di perairannya. Bantuan Tiongkok untuk Timor-Leste mungkin



dimotivasi oleh keinginan untuk mendapatkan sumber energi dari negara tersebut. Keputusan Timor-Leste untuk membeli kapal-kapal patroli dari Tiongkok daripada bergabung dengan program kapal patroli Pasifik Selatan pemerintah Australia mungkin dimotivasi oleh keinginan mereka untuk menyeimbangkan hubungan mereka dengan Australia.

